

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah oleh para pengguna informasi. Laporan keuangan merupakan komponen penting yang harus diungkapkan oleh pemerintah daerah sejak otonomi daerah mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat. Dan sudah menjadi konsekuensi jika laporan keuangan tersebut harus dilaporkan secara terbuka dan aksesibel bagi para pengguna informasi karena laporan keuangan itu merupakan refleksi dari komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan mandat dari masyarakat dan mewujudkan *good governance* di pemerintah daerah itu sendiri.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten wilayah Eks Karesidenan Banyumas dengan metode pengumpulan data melalui survey kuisisioner. Kuisisioner dalam penelitian ini ditujukan kepada para pengguna informasi laporan keuangan daerah di Kabupaten wilayah Eks Karesidenan Banyumas dengan responden dari anggota DPRD Kabupaten di wilayah Eks Karesidenan Banyumas, Inspektorat sebagai pengawas internal, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dengan metode *purposive sampling*, kemudian ditentukan sampel sebanyak 180 anggota DPRD, 84 pegawai Inspektorat, dan 40 aktivis LSM. Pengujian menggunakan regresi linier berganda.

Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah oleh para pengguna informasi. Sementara aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Secara simultan penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Kata kunci: laporan keuangan daerah, aksesibilitas, informasi keuangan daerah.